

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah masuk ke dalam negara yang kedua setelah Tiongkok sebagai negara dengan pencemaran laut di dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 68,7 juta ton per tahun. Jenis sampah terbesar adalah sampah organik khususnya sisa makanan, yaitu sekitar 41,27%. Sekitar 38,28% sampah berasal dari rumah tangga. Selain itu, sampah organik juga merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. Data KLHK tahun 2022 juga menyebutkan bahwa sebanyak 65,83% sampah di Indonesia masih dibuang ke tempat pembuangan akhir (ppid.menlhk.go.id).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah ialah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain (Hendra, 2016:79).

Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, menjadi permasalahan yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Di Kota Serang, Provinsi Banten, permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua kalangan, khususnya pemerintah daerah. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Serang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data Dinas Lingkungan

Hidup Kota Serang, sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 320-370 ton, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah dalam tahun-tahun yang akan datang jika tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan yang sesuai.

Sampah yang menumpuk di berbagai titik bukan hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Masalah ini dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, pencemaran tanah dan air, serta dampak negatif lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya sekadar melaksanakan tugasnya, tetapi juga untuk memperkuat komunikasi dan edukasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat.



Gambar 1.1 Tempat Pembuangan Sampah Liar Kota Serang

Sumber. <https://mediabanten.com/>

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten adalah daerah hasil pemekaran sebagian wilayah dari kabupaten Serang. Jumlah penduduk kota Serang yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas penduduk, yang mana hal itu dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah. Kota Serang saat ini mempunyai satu buah TPA yaitu TPA Cilowong yang berada di Kecamatan Taktakan sebelah barat kota Serang (Febriyanto, 2017:110). TPA Cilowong menjadi wewenang dari pemerintah

kota Serang. Segala aktivitas pasti akan menghasilkan sampah yang tidak terhitung banyaknya begitu pun juga yang terjadi di daerah Cilowong yang dimana tempat tersebut titik pembuangan terakhir yang ada di wilayah Serang.



Gambar 1.2 Kondisi sampah di TPSA Cilowong

Sumber. <https://rm.id/>

Volume sampah yang masuk ke TPSA Cilowong terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Serang, tetapi juga karena TPSA Cilowong harus menampung sampah dari Kabupaten Serang. Situasi ini semakin memperburuk kondisi TPSA Cilowong yang sudah mendekati kapasitas maksimalnya.

Namun sekarang Pemkot Serang melakukan kebijakan perjanjian dengan Tangsel yang menyepakati bahwa pemkot serang harus menerima dan mengelola sampah kiriman dari Tangsel selama 3 tahun terhitung dari tahun 2021 hingga 2024. Meski bantuan dana sebesar 21 miliar rupiah dapat membantu, fakta bahwa 50% dari total sampah yang masuk ke TPA Cilowong berasal dari luar daerah memperburuk situasi dan menciptakan konflik community engagement. Hal ini memerlukan komunikasi yang transparan dan dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi ketidakpuasan yang ada.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan sangat penting. DLH bukan hanya dituntut untuk merumuskan kebijakan, tetapi juga untuk menjelaskan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Program-program sosialisasi dan edukasi harus dikembangkan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Namun, sering kali program-program ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi masyarakat, serta ketidakpahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. komunikasi yang kurang jelas antara pemerintah dan masyarakat mengenai pengelolaan sampah menyebabkan kesulitan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah membuat masyarakat merasa dirugikan. Sebagian masyarakat menganggap sampah sebagai masalah yang harus diselesaikan pemerintah sepenuhnya, tanpa memahami bahwa peran masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah juga sangat penting. Identifikasi masalah dalam komunikasi kebijakan ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah kota untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Pentingnya komunikasi dalam mengelola masalah sampah tidak bisa diremehkan. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif. Mengingat aduan dari warga Cilowong yang masih berlanjut, sudah saatnya pemerintah memperbaiki strategi komunikasinya. Marasabessy (2022:20) menunjukkan bahwa tanpa komunikasi yang tepat, kebijakan tidak akan bisa berlaku secara maksimal.

Permasalahan dari penelitian ini ialah komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah belum tepat karena masih banyaknya keluhan dari warga Cilowong yang merasa banyak dirugikan oleh pemerintah. Maka pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakannya dalam pengelolaan sampah tersebut agar komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat menjadi lebih baik, karena diperlukannya komunikasi kebijakan pemerintah yang tepat dengan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Penelitian ini membahas komunikasi kebijakan pemerintah dengan masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah di Cilowong dan merujuk pada konsep yang lebih spesifik yaitu komunikasi kebijakan, yang mana konsep tersebut akan menjadi sebuah pembahasan untuk mengkaji lebih dalam pembahasan tentang permasalahan utama yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah **“Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cilowong” (Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Provinsi Banten)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Fungsi Humas Pemerintah Daerah Dalam Memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang?
2. Apa saja kebijakan yang dikomunikasikan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengelolaan sampah?
3. Apakah ada batasan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat?
4. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat karena banyaknya permasalahan yang ada, maka diperlukan pembatasan masalah agar fokus pada pokok masalah yang ingin diteliti, sehingga tidak menyimpang dari topik. Oleh karena itu, fokus penelitian dibatasi pada Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, untuk menjaga fokus pada pokok masalah yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

”Bagaimana Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.
2. Komunikasi Kebijakan Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.
3. Masalah dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dalam memperkuat Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan banyak manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori-teori ilmu komunikasi, *public relations*, *external relations*, Humas pemerintah, dan komunikasi kebijakan pemerintah. sehingga dapat menambah pemahaman dan wawasan pengembangan ilmu masyarakat dan semoga berguna bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta secara umum sebagai literature dan memperluas pengembangan kajian informasi tentang fungsi Humas Pemerintah khususnya mengenai penanganan sampah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pembaca untuk dapat mengetahui fungsi dan komunikasi kebijakan pemerintah Kota Serang. Juga

diharapkan memberikan kontribusi positif dan bahan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam memperkuat komunikasi kebijakan.